

EFEKTIVITAS PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN TULANG BAWANG

I Kadek Lear Stone Anugrah¹, Muh. Ilham² & Karno³
^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia
*Corresponding Author: kls.anugrah@gmail.com

ABSTRACT

Stunting is a condition of growth disorders in toddlers characterized by height below the age standard, and is often caused by chronic malnutrition and an unsupportive environment. This condition has long-term impacts on children's physical health and cognitive development. This study aims to analyze the effectiveness of stunting management policies in Tulang Bawang Regency, with a focus on the suitability between policy plans and implementation, identifying supporting and inhibiting factors in its implementation, and assessing efforts that can be made to improve program effectiveness. The research approach used is qualitative, referring to the theory of policy effectiveness from Dr. Riant Nugroho which includes aspects of policy accuracy, implementation, targets, environment, and process. The results of the study indicate that the stunting management policy in Tulang Bawang Regency is classified as effective, especially because of environmental support and policies that are relevant to community needs. However, challenges are still encountered, especially the low level of community understanding regarding the importance of nutrition. Recommended efforts to improve program effectiveness include strengthening socialization, increasing the capacity of Posyandu cadres, and optimizing funding, especially in hard-to-reach areas.

Keywords: Stunting, Policy Effectiveness, Nutrition, Tulang Bawang Regency, Health Policy

PENDAHULUAN

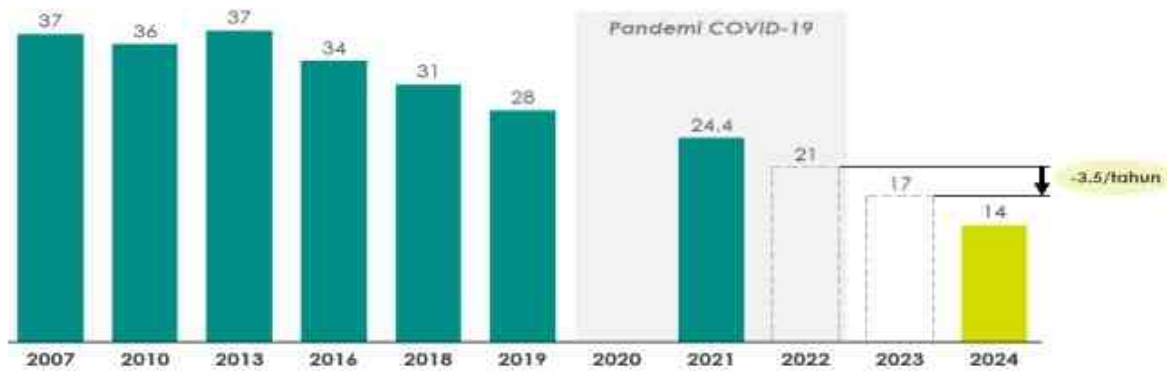
Stunting merupakan masalah kesehatan yang sangat penting di banyak negara, terutama di negara berkembang. Stunting, atau pertumbuhan terhambat pada anak akibat malnutrisi kronis, tidak hanya mempengaruhi tinggi badan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas ekonomi (Dermawan dkk., 2022; Millenia, 2021; Sutarto dkk., 2018). Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah, lebih rentan terhadap penyakit, dan berpotensi memiliki produktivitas yang rendah di masa dewasa. Oleh karena itu, kebijakan penanganan stunting sangat krusial untuk memastikan generasi mendatang memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan mampu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan negara.

Kebijakan penanganan stunting mencakup berbagai intervensi yang dirancang untuk mengatasi penyebab utama dan faktor risiko stunting. Ini termasuk program pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, edukasi tentang praktik pemberian makan yang baik, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih (Sabila dkk., 2024). Intervensi ini perlu dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi, melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, kebijakan ini harus didukung oleh komitmen politik yang kuat dan alokasi anggaran yang memadai (Rahmawati dkk., 2024). Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pemerintah dapat secara efektif mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Stunting di Indonesia merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia dan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya

manusia suatu bangsa karena kondisi ini tidak hanya mempengaruhi tinggi badan anak tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap perkembangan otak kemampuan belajar produktivitas dan kesejahteraan sosial ekonomi anak di masa depan.

Gambar 1 Target penanganan stunting



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024

Meskipun berbagai kebijakan dan intervensi telah dilakukan pemerintah angka stunting di Indonesia masih tergolong tinggi dan belum mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 21,5 persen mengalami penurunan sekitar 0,8 persen dari tahun sebelumnya namun angka ini masih jauh dari target nasional yang dicanangkan pemerintah yaitu sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Dengan kompleksitas faktor penyebab dan tingginya beban stunting di Indonesia maka penyelesaiannya tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor atau program tertentu diperlukan pendekatan holistik integratif dan partisipatif untuk menciptakan ekosistem pembangunan kesehatan yang berkelanjutan peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga tokoh masyarakat dunia usaha dan media menjadi sangat penting dalam memperkuat gerakan nasional percepatan penurunan stunting.

Pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah tercatat mencapai angka 20,8 persen. Angka ini menempatkan Lampung Tengah sebagai salah satu daerah dengan beban stunting yang cukup tinggi, bahkan melampaui rata-rata prevalensi stunting Provinsi Lampung. Stunting, sebagai salah satu indikator utama masalah gizi kronis pada anak-anak, tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif dan produktivitas mereka di masa depan. Prevalensi stunting yang tinggi pada wilayah tersebut mencerminkan adanya tantangan struktural dalam pelayanan kesehatan dasar ketahanan pangan, sanitasi lingkungan, dan edukasi gizi masyarakat.

Kabupaten Lampung Tengah secara konsisten mengimplementasikan kedelapan aksi tersebut melalui kerja sama lintas sektor dan melibatkan semua tingkatan pemerintahan dari kabupaten hingga desa. Salah satu upaya konkret dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan yang mengintegrasikan berbagai program intervensi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan. Kolaborasi antar sektor ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh intervensi yang dilakukan tidak berjalan secara parsial, tetapi menyatu dalam satu arah dan tujuan, yaitu menurunkan angka stunting secara signifikan.

Di tingkat kampung atau desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga mendorong penguatan kapasitas dan peran pemerintah desa melalui regulasi yang jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab desa dalam penanganan stunting. Hal ini mencakup pelibatan aktif kepala kampung, kader pembangunan manusia (KPM), dan kader posyandu dalam pengawasan tumbuh kembang anak serta pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis gizi dan kesehatan lingkungan. Keberadaan KPM menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa data balita stunting diperoleh secara akurat dan tepat waktu, serta menjadi penghubung antara pemerintah desa dan sektor pelayanan dasar.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga memperkuat sistem manajemen data sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based). Melalui sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan aplikasi digital, proses pencatatan dan pelaporan kondisi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan anak, serta data tentang asupan gizi dan kondisi sanitasi lingkungan rumah tangga, menjadi bagian penting dalam penilaian dan evaluasi kebijakan yang sedang berjalan.

Peran serta masyarakat dalam mendukung program intervensi stunting juga diperkuat melalui kampanye edukasi yang masif tentang pentingnya gizi seimbang, praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA) yang tepat, serta pola hidup bersih dan sehat. Kampanye ini dilakukan tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui media sosial dan kegiatan langsung di tingkat kampung, seperti kelas ibu hamil, penyuluhan di posyandu, serta penyebaran leaflet dan poster edukatif.

Upaya tersebut membuahkan hasil yang sangat signifikan. Pada tahun 2022, Kabupaten Lampung Tengah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 8,7 persen. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam aspek teknis, tetapi juga menunjukkan adanya kemauan politik (political will), komitmen anggaran, serta efektivitas mekanisme koordinasi antar lembaga dan aktor. Lebih jauh, capaian tersebut menempatkan Lampung Tengah sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah di Provinsi Lampung pada tahun tersebut.

Keberhasilan dalam menurunkan angka stunting menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung. Efektivitas kebijakan juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta membangun kolaborasi yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama lintas sektor—baik dengan dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas lokal—memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif dan partisipatif tidak hanya memperkuat upaya penanggulangan stunting secara spesifik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial yang lebih tangguh di tingkat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Analisis dilakukan dengan meninjau sejumlah indikator keberhasilan, tantangan dalam implementasi, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih tepat dalam menghadapi persoalan stunting secara menyeluruh.

Meskipun Kabupaten Tulang Bawang telah menunjukkan capaian positif dalam penurunan angka stunting, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang membahas evaluasi efektivitas kebijakan secara sistematis. Banyak kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek medis dan intervensi gizi, sementara dinamika sosial, tata kelola program, dan mekanisme koordinasi antar

lembaga di tingkat lokal belum banyak mendapatkan perhatian. Evaluasi menyeluruh yang mencakup peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, serta efektivitas koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memahami faktor keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yang holistik terhadap pelaksanaan kebijakan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Fokus utama mencakup analisis terhadap implementasi program di tingkat lapangan, sejauh mana target-target kebijakan tercapai, serta identifikasi kendala dan peluang yang dihadapi selama proses berlangsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, baik di Kabupaten Tulang Bawang maupun di daerah lain yang memiliki permasalahan serupa.

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang memiliki arti tercapainya hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Nisa & Setiawati, 2022). Konsep efektivitas selalu berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya tercapai. Hal ini dapat dianalisis dari berbagai perspektif dan diukur dengan berbagai cara, serta memiliki hubungan yang erat dengan efisiensi (Setiani, 2020).

Menurut Gedeian (1991), semakin tinggi pencapaian tujuan organisasi, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Efektivitas juga dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan atau pencapaian yang sesuai dengan tujuan. Kata "efektif" adalah bentuk dasar, sedangkan kata sifat yang berasal dari kata tersebut adalah efektivitas. Menurut Anugrah dkk. (2022), efektivitas didefinisikan sebagai proses komunikasi yang mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memperhatikan anggaran biaya, waktu yang telah ditetapkan, dan jumlah personel yang tersedia.

Selain itu, Hadayaningrat dalam bukunya *Azas-Azas Organisasi Manajemen* menjelaskan efektivitas sebagai berikut: "Efektivitas adalah pengukuran yang menunjukkan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya" (Handayaningrat, 1995). Menurut Hadayaningrat, efektivitas dapat dipahami sebagai sebuah pengukuran yang menilai sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dengan matang dapat tercapai. Berdasarkan pendapat tersebut, semakin besar pencapaian tujuan organisasi, semakin tinggi pula efektivitasnya.

Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Syamsi, "Efektivitas (hasil guna) lebih menekankan pada dampak atau hasil yang dicapai, tanpa terlalu memperhitungkan pengorbanan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sementara itu, efisiensi (daya guna) tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai, tetapi juga memperhitungkan besar kecilnya pengorbanan yang diperlukan untuk mencapainya" (Syamsi, 1983). Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara efektivitas dan efisiensi terletak pada fokusnya. Efektivitas menekankan pada hasil atau efek dari pencapaian tujuan, sementara efisiensi lebih memperhatikan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, efektivitas didefinisikan sebagai berikut: "Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut" (Mahmudi, 2005). Berdasarkan pendapat ini, efektivitas memiliki hubungan timbal balik antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output, semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas menilai hasil (outcome), di mana suatu program atau kegiatan dianggap efektif jika output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diinginkan, atau dengan kata lain, mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana.

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang berfokus pada hasil guna suatu organisasi, program, atau kegiatan, yang menunjukkan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Hal ini juga mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya dan target-target yang ditetapkan. Dengan demikian, pengertian efektivitas lebih menekankan pada hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Peter F. Drucker, yang dikutip oleh H.A.S. Moenir dalam bukunya *Manajemen Umum di Indonesia*, yang mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “*Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done*”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan) (Kowaas dkk., 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus memiliki kelebihan utama dalam hal kemampuan untuk menggali dan memahami fenomena sosial secara mendalam (Rustamana dkk., 2024). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks spesifik dari subjek yang diteliti. Dengan fokus pada satu kasus atau lokasi tertentu, penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi fenomena yang diteliti, seperti kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang, dan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat.

Selain itu, Pendekatan ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam proses penelitian. Peneliti dapat menyesuaikan metode pengumpulan data sesuai dengan perkembangan temuan awal di lapangan. Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk merespons dinamika dan kompleksitas yang muncul selama penelitian, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Pendekatan studi kasus dalam penelitian deskriptif kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam yang holistik, menggabungkan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi data ini meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, karena informasi yang diperoleh dapat dibandingkan dan diverifikasi dari berbagai perspektif. Hal ini sangat penting dalam penelitian kebijakan publik, di mana berbagai pihak yang terlibat memiliki pandangan dan pengalaman yang beragam. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual, tetapi juga memberikan rekomendasi yang lebih terarah dan praktis untuk peningkatan kebijakan di masa depan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semistruktur untuk mengevaluasi efektivitas penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang, dengan mengacu pada kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber disusun berdasarkan identifikasi masalah yang ada, relevansi dengan tujuan penelitian, serta rumusan masalah yang hendak dicapai.

dilanjutkan dengan wawancara semistruktur dengan informan yang terdiri dari Kepala Seksi Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Petugas Gizi di Puskesmas, Kader Posyandu, dan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Validasi data juga

dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat yang turut terlibat dalam program penanganan stunting.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penanganan stunting yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan rencana dan prosedur yang ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program penanganan stunting di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori dari Dr. Riant Nugroho mengenai efektivitas kebijakan, yang terdiri dari lima aspek utama, yaitu: Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. Aspek-aspek ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan pelaksanaan program penanganan stunting sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, data yang diperoleh memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan stunting di Kabupaten Tulang Bawang, serta tantangan dan peluang dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Efektivitas kebijakan penanganan stunting yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan rencana dan prosedur yang ditetapkan Tepat Kebijakan

Peneliti kemudian menanyakan mengenai kebijakan yang dirancang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dan bagaimana kebijakan tersebut mendukung pelaksanaan Perpres No. 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti menanyakan mengenai kebijakan yang dirancang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang untuk mendukung pelaksanaan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Berdasarkan data terbaru mengenai penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 terlihat adanya perbaikan signifikan pada berbagai kelompok usia anak. Pada usia 2 tahun, tercatat sebanyak 1.200 anak mengalami stunting. Namun, seiring berjalannya program intervensi yang terintegrasi, terjadi penurunan jumlah anak yang mengalami stunting secara konsisten hingga usia 11-12 tahun. Pada usia 8,5 tahun, jumlah anak stunting menurun menjadi 320 anak dari jumlah awal 1.200 anak. Artinya, sebanyak 880 anak mengalami perbaikan, dengan persentase perbaikan mencapai 73,3%.

Kemajuan ini terus berlanjut hingga usia 11-12 tahun, di mana dari jumlah awal yang sama (1.200 anak), hanya tersisa 280 anak yang mengalami stunting, menunjukkan perbaikan pada 920 anak atau sekitar 76,7%. Bahkan, pada kelompok anak usia 11-12 tahun yang berasal dari kelompok awal usia 8,5 tahun (980 anak), jumlah yang mengalami stunting hanya tinggal 210 anak. Dengan demikian, sebanyak 770 anak mengalami perbaikan, mencerminkan persentase perbaikan yang sangat tinggi, yaitu 78,6%

Hal tersebut peneliti temukan pada wawancara Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang (Informan I) sebagaimana disampaikan bahwa:

“Kami merancang kebijakan yang menekankan pada intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kebijakan ini juga mencakup pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk, penyuluhan

gizi untuk ibu hamil, dan pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu. Semua kebijakan ini didasarkan pada Perpres No. 72 Tahun 2021, dengan fokus utama pada penurunan angka stunting di daerah kami.”

Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara dari Petugas Gizi Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang (Informan II), yang menambahkan:

“Kami sudah menerapkan kebijakan tersebut dengan melibatkan berbagai sektor. Selain Dinas Kesehatan, kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan sesuai dengan Perpres. Kami memastikan bahwa program penanganan stunting ini berjalan terpadu di tingkat masyarakat.”

Dukungan kebijakan dari pimpinan daerah berperan dalam memastikan sumber daya yang memadai, sementara kampanye yang menitikberatkan pada edukasi gizi dan pola asuh sehat berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan memperkuat koordinasi program, didukung oleh kebijakan ketahanan pangan yang menjamin akses nutrisi bagi kelompok rentan. Pemantauan berkala memastikan program tetap optimal dan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan dua Petugas Gizi (Nutrisionist Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang, terkait dengan pelaksanaan intervensi gizi sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021.

“Untuk ibu hamil dan balita, kami melaksanakan intervensi dengan memberikan makanan tambahan sesuai kebutuhan, serta penyuluhan mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang. Kami juga memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan secara rutin di posyandu dan puskesmas untuk menghindari masalah gizi buruk yang dapat berujung pada stunting.”

Informan II HPK Petugas Gizi (Nutrisionist Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang menambahkan:

“Kami memberikan Makanan Tambahan (PMT) dan suplemen gizi seperti tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta pemberian makanan bergizi bagi balita di bawah dua tahun. Selain itu, kami melakukan pemantauan perkembangan anak secara rutin untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik dan terhindar dari masalah gizi.”

Berikut adalah narasi hasil wawancara dengan dua Kader Posyandu di Kabupaten Tulang Bawang, terkait dengan pelaksanaan intervensi gizi untuk penanganan stunting sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021. Informan I Kader Posyandu di Kabupaten Tulang Bawang menjelaskan:

“Sebagai kader Posyandu, kami bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil dan balita mengenai pentingnya gizi seimbang. Kami juga membantu dalam pembagian makanan tambahan, seperti makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita. Di Posyandu, kami melaksanakan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, serta memberikan informasi terkait pertumbuhan dan perkembangan mereka.”

Tepat Pelaksanaan

Berdasarkan teori efektivitas Riant Nugroho (2012) keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada aspek tepat pelaksanaan yang mencakup tiga indikator utama pelaksana sumber daya yang terlibat dan partisipasi masyarakat. Efektivitas program penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menurunkan angka stunting pada anak-anak di berbagai kelompok usia.

Masyarakat yang memiliki anak stunting merasa sangat terbantu dengan adanya intervensi berupa pemberian makanan tambahan secara rutin yang berlangsung selama periode tertentu dan berkontribusi pada perbaikan status gizi anak dari segi ekonomi program ini juga meringankan beban keluarga khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri.

Menurut Kusuma (2015) Posyandu menjadi wadah penting untuk memantau tumbuh kembang anak memberikan layanan kesehatan dasar serta menyampaikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya asupan gizi dan pola asuh yang tepat. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa aspek keterlibatan publik juga berjalan efektif seperti yang digariskan dalam teori kebijakan publik partisipatif.

Peneliti menanyakan apakah dalam melaksanakan kebijakan Dinas Kesehatan sudah mencakup integrasi multisektor sebagaimana diamanatkan dalam Perpres. Berdasarkan wawancara dengan Informan I Kepala dinas Kesehatan menyatakan bahwa:

“Ya, kami memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku di sektor kesehatan. Kami melibatkan Dinas Sosial untuk distribusi bantuan sosial kepada keluarga berisiko, serta Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pola makan yang sehat. Semua sektor bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari Perpres.”

Sementara itu, Informan II menambahkan:

“Integrasi multisektor sudah sangat terlihat dalam pelaksanaan program ini. Kami sering melakukan koordinasi dengan sektor-sektor terkait, terutama Dinas Sosial untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, serta Dinas Pendidikan untuk melakukan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya gizi seimbang.”

Dalam hal keterlibatan dalam integrasi data stunting dengan lembaga lain yang relevan petugas Gizi Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang, Informan I menjelaskan:

“Data stunting kami integrasikan dengan Sistem Informasi Gizi Nasional (SIGNA) agar terpantau dengan baik. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memastikan data yang terkumpul bisa digunakan untuk perencanaan kebijakan yang lebih tepat.”

Informan II petugas Gizi Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang menambahkan:

“Data yang kami kumpulkan sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah. Kami bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk menggabungkan data ini agar bisa lebih efisien dalam menanggulangi masalah stunting.”

Dalam hal keterlibatan dalam integrasi data stunting dengan lembaga lain yang relevan, Kader Posyandu di Kabupaten Tulang Bawang menjawab Informan I menyatakan:

“Kami sering berkoordinasi dengan Puskesmas untuk memastikan data stunting yang kami kumpulkan terintegrasi dengan data yang ada di tingkat kabupaten. Ini memudahkan kami dalam pelaporan dan untuk mendapatkan bantuan bagi keluarga yang membutuhkan.”

Tepat Target

Berdasarkan kajian teoritis yang dikemukakan oleh Riant (2017), ketepatan dalam implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik harus mempertimbangkan tiga aspek utama. Pertama, kelompok sasaran yang menjadi target intervensi harus sesuai dengan perencanaan awal, tidak mengalami tumpang tindih dengan program intervensi lainnya, serta tidak bertentangan dengan kebijakan kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, kesiapan kelompok sasaran dalam menerima intervensi harus diperhatikan guna memastikan efektivitas program. Ketiga, kebijakan intervensi yang diterapkan dapat berupa kebijakan baru atau pembaruan dari kebijakan sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran intervensi gizi spesifik telah ditetapkan secara jelas dan terarah. Sasaran utama mencakup ibu hamil, ibu menyusui dengan anak berusia di bawah 6 bulan, serta ibu menyusui dengan anak berusia 6 hingga 23 bulan. Pemilihan kelompok sasaran ini didasarkan pada pertimbangan fisiologis dan risiko gizi yang lebih tinggi pada periode tersebut. Pemberian intervensi kepada kelompok sasaran yang tepat diharapkan dapat meningkatkan status gizi ibu dan anak serta mencegah terjadinya malnutrisi, terutama dalam rangka menekan angka stunting.

Intervensi gizi spesifik menekan angka stunting, terutama di daerah dengan tingkat malnutrisi tinggi. Keberhasilan program bergantung pada kebijakan pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat. Kesadaran akan pentingnya gizi selama kehamilan dan menyusui perlu terus ditingkatkan. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Bawang terkait “Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam mengoordinasikan pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif?” Pada pertanyaan mengenai peran Dinas Kesehatan dalam mengoordinasikan pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, Informan I menjelaskan:

“Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mengoordinasikan intervensi ini. Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dapat berjalan lancar, dan intervensi sensitif yang melibatkan pendidikan gizi bagi masyarakat serta peningkatan pola makan yang sehat juga terlaksana dengan baik.”

Informan II menambahkan:

“Koordinasi kami dengan Puskesmas dan Posyandu sangat penting untuk memastikan intervensi berjalan dengan baik. Kami juga melakukan monitoring secara rutin, memastikan agar anak-anak dan ibu hamil mendapatkan perhatian yang tepat sesuai dengan kebijakan yang ada.”

PMT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi yang diperlukan guna mencegah serta menanggulangi masalah gizi, termasuk stunting. Pemilihan menu dalam program ini disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang dengan memperhatikan keberagaman bahan pangan, ketersediaan lokal, serta kesesuaian dengan selera dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Tepat Lingkungan

Menurut Riant Nugroho terdapat dua lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan meliputi interaksi antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga terkait lainnya dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, lingkungan eksternal kebijakan terdiri atas tiga elemen utama: pertama, opini publik yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari; kedua, *interpretive institution*, yaitu lembaga-lembaga strategis seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan yang turut membentuk makna dan penerimaan kebijakan; dan ketiga, individu-individu yang memiliki peran signifikan dalam menginterpretasikan serta mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Program penyuluhan gizi dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang pelaksanaan kegiatan selama satu tahun menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara kebijakan dengan lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan. Berbagai capaian yang berhasil diraih mencerminkan bagaimana kebijakan tidak hanya dirumuskan secara normatif, tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan fisik masyarakat setempat. Tepatnya pelaksanaan di desa, posyandu, sekolah, dan puskesmas memperlihatkan respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat di lingkungan mereka masing-masing, sekaligus memperkuat relevansi kebijakan terhadap kondisi lokal.

Edukasi pola asuh dan kesehatan reproduksi menasar 300 remaja, sementara penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif diberikan kepada 320 ibu. Edukasi MP-ASI dan gizi seimbang melibatkan 410 ibu, dan pemberian makanan tambahan (PMT) diberikan kepada 430 balita. Kegiatan cek pertumbuhan dan imunisasi dilakukan kepada 540 balita. Selain itu, pelatihan kader posyandu diikuti oleh 120 kader dan kegiatan evaluasi tahunan serta lomba desa bebas stunting melibatkan 600 peserta. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi dalam intervensi gizi spesifik, gizi sensitif, serta kegiatan lintas jenis yang mendukung efektivitas upaya penurunan stunting secara komprehensif. Selanjutnya peneliti menanyakan untuk memastikan sasaran kebijakan tepat? Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Informan I menjelaskan:

“Kami bekerja sama dengan Puskesmas dan Posyandu untuk melakukan identifikasi keluarga 1.000 HPK hal ini kami lakukan selama 1 bulan penuh yaitu pada bulan februari dan agustus selama 2 bulan penuh untuk memberikan makanab dan memastikan pendistribusian. Setiap keluarga yang terdata mendapatkan perhatian khusus, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita.”

Informan II Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang menambahkan:

“Di tingkat Posyandu, kami secara rutin memantau dan mendata ibu hamil dan balita yang masuk dalam kategori 1.000 HPK. Informasi ini kemudian dikumpulkan dan diproses untuk mendukung upaya penurunan stunting.”

Dalam konteks lingkungan kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaan program stunting di Tulang Bawang menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, serta lembaga pelaksana seperti Puskesmas dan Posyandu. Pendekatan berbasis data melalui pemantauan SIGNA dan evaluasi berkala telah memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses implementasi juga melibatkan intervensi langsung seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan peran kader Posyandu dalam mendampingi keluarga berisiko stunting.

Dari perspektif lingkungan eksternal kebijakan, proses penyebaran informasi dan keterlibatan masyarakat dalam program ini menjadi faktor kunci dalam efektivitas kebijakan. Opini publik yang semakin menyadari pentingnya pencegahan stunting telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gizi dan kesehatan. Selain itu, interpretive institution seperti media dan kelompok masyarakat membantu mengawal serta mempercepat adopsi kebijakan di tingkat lokal. Individu-individu strategis, seperti tenaga kesehatan dan kader Posyandu, juga berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara efektif di lapangan.

KESIMPULAN

Efektivitas kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa implementasi program telah selaras dengan teori "lima tepat" dari Riant Nugroho yang mencakup tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan telah menyusun kebijakan sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021 dengan menitikberatkan pada intervensi gizi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran. Pelaksanaan program ini melibatkan sinergi lintas sektor yang memperkuat penyebaran bantuan dan edukasi gizi kepada masyarakat.

Koordinasi yang baik antara Puskesmas dan Posyandu juga mendukung ketercapaian target sasaran, khususnya ibu hamil dan balita. Selain itu, lingkungan kebijakan di tingkat lokal terbentuk melalui kerja sama yang harmonis antar lembaga, termasuk dalam menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. Secara proses, implementasi kebijakan menunjukkan kesiapan strategi dan penerimaan masyarakat yang mulai terbentuk, walau tetap dibutuhkan sosialisasi lanjutan untuk memperkuat pemahaman publik. Dengan demikian, kebijakan penanganan stunting di Tulang Bawang dapat dikatakan cukup efektif, karena telah memenuhi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan publik yang terencana dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus, M. R. (2023). *Konstitusionalisme Pelayanan Publik di Era Digital di Negara Republik Indonesia*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Djauhari, T. (2017). Gizi dan 1000 HPK. *Saintika Medika*, 13(2), 125-133.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Endah, K. (2018). Etika pemerintahan dalam pelayanan publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141-151.
- Gedeian, A. G. (1991). *Organization Theory and Design*. University of Colorado.
- Gumah, B., & Aziabah, M. A. (2020). "Our Lives Are Affected by Government Agencies": Citizens' Perception Survey as a Measure of Public Service Efficiency in Ghana. *SAGE Open*, 10(2), 2158244020935900.
- Handyaningrat, S. (1995). *Azas-azas Organisasi Manajemen*. CV Mas Agung.
- Hanson, T. (2016). *Estimating output mix effectiveness: A scenario approach* (No. 14/2016). Memorandum.
- Mahmudi, M. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Makmur. (2021). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika aditama.
- Mariana, D. (2010). Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. *Governance*, 1(1), 13-20.

- Marni, L. (2020). Dampak kualitas sanitasi lingkungan Terhadap stunting. *Jurnal Stamina*, 3(12), 865–872.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250–265.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P. F., & Raihan, R. (2024). Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(5), 71–80.
- Riant, N. (2017). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta. PT Media Komputindo.
- Syamsi, I. (1983). *Pokok-pokok organisasi dan manajemen*.
- Sulaiman, E. S. (2021). *Manajemen kesehatan: Teori dan praktik di puskesmas*. Ugm Press.

Undang-Undang:

Perpres No.72 Tahun 2021

Internet:

BPS. (2024). *Persentase Stunting di Kabupaten Tulang Bawang*. BPS.
<https://tulangbawangkab.bps.go.id/indicator/30/1244/1/persentase-stunting-di-kabupaten-tulang-bawang.html>

Exemplars. (2022). *Stunting 101*. <https://www.exemplars.health/topics/stunting>

Jurnal: Amalia, L., & Yunginger, R. (2022). Aquaponik Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menurunkan Stunting Sebagai Pencapaian Target SDGs Desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 37–45.

Amalia, M., Anggraini, Y., & Satria, D. (2022). Faktor yang berhubungan dengan stunting pada balita usia 12-59 bulan di Kenagarian Balingka Kabupaten Agam tahun 2021. *Jurnal Ners*, 6(1), 40–45.

Anugrah, A., Mulawarman, W. G., & Nurlaelah, N. (2022). School Operational Assistance Management to Lighten School Burden: A Literature Review. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 2(3), 322–330.

Anyanti, J., Akuiyibo, S., Idogho, O., Ohuneni, S., & Isiguzo, C. (2020). Assessment of Factors Contributing to TB Treatment Adherence among Patients on TB Treatment in Kano State, Nigeria: A Case Study. *Journal of Tuberculosis Research*, 8, 209–222.

Archda, R., & Tumangger, J. (2019). Hulu-hilir penanggulangan stunting di Indonesia. *JPI: Journal of Political Issues*, 1(1), 1–9.

Arifin, A. R. P. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Efektivitas Perencanaan Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang*. STIE PGRI Dewantara Jombang.

Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost? *The Lancet*, 382(9890), 452–477.

BPS. (2024). *Persentase Stunting di Kabupaten Tulang Bawang*. BPS.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

Budiman, A. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang*

- Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dermawan, A., Mahanim, M., & Siregar, N. (2022). Upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten asahan. *Jurnal Bangun Abdimas*, 1(2), 98-104.
- Djauhari, T. (2017). Gizi dan 1000 HPK. *Saintika Medika*, 13(2), 125-133.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Ekayanthi, N. W. D., & Suryani, P. (2019). Edukasi gizi pada ibu hamil mencegah stunting pada kelas ibu hamil. *Jurnal Kesehatan*, 10(3), 312-319.
- Elisa, N. (2014). Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Perijinan Sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. *Kalam Keadilan*, 2(1).
- Exemplars. (2022). *Stunting 101*.
- Febrilianda, M. (2023). *Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota*. Universitas Negeri Padang.
- Gedeian, A. G. (1991). *Organization Theory and Design*. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Handyaningrat, S. (1995). *Azas-azas Organisasi Manajemen*. CV Mas Agung.
- Herman, J. (2017). Implementasi pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Paradigma (JP)*, 3(3), 282-290.
- Hermila, N., Khairani, M. D., & Dewi, A. P. (2023). Faktor Risiko Pengetahuan Gizi, Pantang Makan dan Asi Eksklusif dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Desa Gedung Asri Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023. *Jurnal Gizi Aisyah*, 6(1), 61-69.
- Herni, H., Tahir, N., & Arfah, S. R. (2024). Collaborative Governance: Membangun Solusi Bersama Dalam Penanggulangan Stunting. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 57-74.
- Hidayatillah, Y., Astuti, Y. P., & Kumala, R. S. D. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Stunting Desa Aenganyar Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(05), 1195-1201.
- Juita, D. N., Yusran, R., Eriyenti, F., & Alhadi, Z. (2022). Efektivitas Pencegahan Stunting Melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16734-16744.
- Kanang, A. R. (2017). Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kawasan Industri Makassar. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 21(2), 42-53.
- Komalasari, S. A. S., Maritasari, D. Y., & Rukmana, N. M. (2024). Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Kunjungan Ibu untuk Menimbang Balita ke Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Tiuh Toho Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 7(1), 96-106.
- Kowaas, A. S., Pioh, N., & Kumayas, N. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Kusuma, D. P. (2015). *Hubungan Persepsi dengan Perilaku Ibu Membawa Balita ke Posyandu*.
- Larasati, N. N., & Wahyuningsih, H. P. (2018). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita usia 25-59 bulan di posyandu wilayah puskesmas wonosari ii tahun 2017*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Mahmudi, M. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Makmur. (2021). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika aditama.
- Mamulaty, A., Rengifurwarin, Z. A., & Normawati, N. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 587-601.
- Mariana, D. (2010). Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. *Governance*, 1(1), 13-20.
- Marni, L. (2020). Dampak kualitas sanitasi lingkungan Terhadap stunting. *Jurnal Stamina*, 3(12), 865-872.
- Merliana, T. V. (2024). *Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Mencegah Stunting*. Universitas Sebelas Maret.
- Millenia, S. D. P. (2021). *Gambaran Tinggi Badan Ibu Yang Memiliki Balita Stunting Usia 25-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Patuk I Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Montenegro, C. R., Gomez, G., Hincapie, O., Dvoretzkiy, S., DeWitt, T., Gracia, D., & Misas, J. D. (2022). The pediatric global burden of stunting: Focus on Latin America. *Lifestyle Medicine*, 3(3), 67.
- Mufadhhal, A. A. W. (2024). *Strategi Komunikasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kampar Dalam Penurunan Stunting*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ningrum, D. W. N. (2020). Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Pelayanan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang. *Perspektif*, 9(1), 46-54.
- Nisa, S. W., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 5(1), 215-228.
- Nugroho, H. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Tamansari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. *Public Policy and Management Inquiry*, 7(1), 651-656.
- Nurak, A., Andayani, L., & Sahriani, S. (2023). Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Upaya Penanggulangan Stunting. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3803-3809.
- Pratama, M. A. T. (2023). *Efektivitas Inovasi Smart Village Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung*. IPDN.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250-265.
- Prianto, W. (2023). Upaya Pemerintah Konawe Selatan Terkait Pertumbuhan Petani Usia Muda Melalui Prodak Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(1), 43-57.
- Rahmawati, S. A., Djumiarti, T., & Yuniningsih, T. (2024). Proses Collaborative Governance Dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 754-771.
- Rakhmatsyah, A., Hasanuddin, M., & Tahir, M. (2015). Dampak Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).
- Rembet, A. T. O., Langkai, J. E., & Kairupan, S. B. (2022). Implementasi Kebijakan Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Manado. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 47-62.
- Riant, N. (2017). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta. PT Media

Kamputindo.

- Riyadh, N. A., Batara, A. S., & Nurlinda, A. (2023). Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health*, 4(1), 1-17.
- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P. F., & Raihan, R. (2024). Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(5), 71-80.
- Sabila, F., Purba, S. H., Ningrum, T. P., Fadila, N., & Andika, W. (2024). Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting Dan Relevansi Penerapan Di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Riset Kesehatan Modern*, 6(3).
- Saraswaty, A. N. (2018). Kebijakan publik dan ritel modern: studi kasus pelaksanaan kebijakan plastik berbayar. *EJurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(1), 113-142.
- Setiani, A. (2020). Efektivitas Proses Belajar Aplikasi Zoom di Masa Pandemi dan Setelah Pandemi Covid-19. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 3(1), 523-530.
- Situmorang, L. S. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan). Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta.
- Suryono, S. (2021). *Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Coblong Kota Bandung*. Universitas Komputer Indonesia.
- Sutarto, S. T. T., Mayasari, D., & Indriyani, R. (2018). Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya. *Agromedicine Unila*, 5(1), 540-545.
- Syamsi, I. (1983). *Pokok-pokok organisasi dan manajemen*.
- Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 25-32.
- Wahsyati, A., Rostyaningsih, D., & Warsono, H. (2024). Efektivitas Program Cengkraman Mata Elang Dalam Mencegah Kasus Stunting Di Kabupaten Demak. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 965-984.
- Wardani, D. W., Suharmanto, S., & Wulandari, M. (2020). Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dan Ketahanan Pangan terhadap Kejadian Stunting pada Balita. *Jurnal Kesehatan*, 11(2), 287-293.
- Wayan, J. I., Hidayat, I. P., Ali, J. F., Pratama, M., Cahya, F. D., Jariyah, A., & Fadila, K. (2023). Analisis Pengaruh Pengetahuan Orang Tua Terhadap Pencegahan Stunting di Desa Kerumut, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 5(1), 52-58.